

## **TANTANGAN KIE KB KULONPROGO 2010**

Mardiya

Diakui atau tidak, dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah, masalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) memiliki kedudukan yang sangat penting, kapanpun dan di manapun. Bukan saja karena KIE sebagai bagian dari upaya memberikan wawasan dan pengetahuan pada warga masyarakat dalam bidang pembangunan tertentu, tetapi juga memiliki andil yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mereka untuk berperan aktif turut serta menyukseskan program-program pembangunan dimaksud sekaligus merasa ikut bertanggungjawab mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai. Ini berarti, kegiatan KIE bukan sekedar memberikan informasi sebagai bagian dari komunikasi, tetapi juga sudah mengarah bagaimana mempengaruhi opini publik, dari tidak mendukung program menjadi mendukung, dari antipati menjadi lebih bertoleransi dari pasif menjadi aktif untuk berpartisipasi, dan sebagainya.

Tentang pentingnya kegiatan KIE dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB), diakui oleh mantan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Prof. Dr. H. Haryono Suyono. Dalam bukunya "Mengubah Loyang Menjadi Emas", beliau menyatakan bahwa dalam menyukseskan program KB, selain pengembangan visi dan misi, perumusan strategi KIE menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sehingga ketika beliau memimpin BKKBN, KIE bidang KB mengalami masa kejayaan yang berimbas pada keberhasilan capaian program. Waktu itu (era 1980 – 1990 an) hampir semua penerbitan surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain tidak henti-hentinya mewartakan tentang KB.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas lapangan KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dibantu oleh para jupen tak henti-hentinya menginformasikan tentang pentingnya KB dalam membangun keluarga kecil bahagia sejahtera. Sehingga lambat laun masyarakat yang sebelumnya tidak kenal dengan KB bahkan anti pati, telah berbalik mendukung dan ikut menyukseskannya.

Bagi Kabupaten Kulonprogo, tahun 2010 adalah tahun yang cukup spesifik dalam pengembangan KIE KB, sekaligus menumbuhkan berbagai tantangan untuk mewujudkannya. Hal ini bukan saja berkaitan dengan upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, tetapi juga dalam kaitannya dengan upaya pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern, upaya pembinaan ketahanan keluarga melalui kegiatan catur bina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK) serta upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Dalam upaya PUP, selain akan dikembangkan kelompok-kelompok PIK Remaja baru terutama jalur sekolah untuk mengantisipasi perilaku negatif remaja yang terkait dengan Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yakni Seksualitas, Napza dan HIV/AIDS, juga akan diintensifkan KIE pada remaja sekolah dan non sekolah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya mendewasakan usia perkawinan dan mengisi masa remaja dengan berbagai kegiatan yang positif sebagai bekal besok sesudah berkeluarga. Sekarang ini di Kulonprogo baru terdapat 17 PIK Remaja yang terdiri dari 13 kelompok jalur non sekolah dan 4 kelompok jalur

sekolah. Tahun 2010, diharapkan paling tidak ada penambahan 2 kelompok jalur sekolah selain secara umum kualitas akan terus ditingkatkan. Intensifikasi KIE PUP nantinya tidak hanya melalui pertemuan penyuluhan atau pembicaraan dalam keseharian, tetapi juga melalui kegiatan seminar, dialog KRR, penyebaran leaflet, pemasangan baliho, siaran radio, pengajian dan sebagainya. KIE tentang PUP dirasa makin urgen, seiring dengan meningkatnya kasus-kasus pernikahan usia dini di Kulonprogo. Bila ditahun 2006 baru ditemukan 19 kasus, tahun 2007 meningkat menjadi 41 kasus dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 68 kasus. Di tahun 2009, meskipun kasusnya belum terungkap secara menyeluruh, dipastikan frekuensinya tetap tinggi mengingat makin kuatnya pengaruh video, cerita dan gambar porno di kalangan remaja yang diperoleh melalui internet atau jejaring Face Book (FB) serta penjualan secara tradisional dalam bentuk Compact Disk (CD), foto, majalah serta buku-buku bacaan. Makin banyaknya korban pelecehan seksual, perkosaan atau seks bebas pada remaja akibat pengaruh buruk segala sesuatu yang berbau pornografi ini telah membuka kemungkinan baru makin rentannya remaja Kulonprogo terhadap penyalahgunaan Napza dan tertularnya HIV/AIDS.

Selanjutnya dalam upaya pengaturan kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi modern, di tahun 2010, Kulonprogo dihadapkan pada realitas cenderung menurunnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meskipun proporsi maupun jumlah Peserta KB Aktif (PA) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2008 penggunaan MKJP yang terdiri dari *Intra Uterie Device (IUD)*, *Medis Operatif Pria (MOP)*, *Medis Operatif Wanita (MOW)* dan Implant masih berjumlah 23.268 akseptor atau proporsinya mencapai 46,68 persen dari total PA yang banyaknya 49.651 akseptor maka pada tahun 2009 proporsinya menurun menjadi 44,56 persen dari

total PA yang banyaknya 50.908 akseptor. Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, sehingga KIE KB melalui kunjungan dari rumah ke rumah (*home visit*) atau KIE melalui pertemuan kelompok sangatlah diperlukan. Persoalannya, jumlah Penyuluh KB sekarang ini sangat terbatas, karena jumlah personilnya saat ini tinggal 52 orang untuk 88 desa se Kabupaten Kulonprogo. Sementara kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terdiri dari Koordinator PPKBD (88 orang), PPKBD (934 orang) dan Sub PPKBD (4.553 orang) diproyeksikan aktivitasnya akan sedikit melemah seiring dengan ketiadaan dana operasional untuk melaksanakan peran baktinya. Ini menjadi tantangan bersama. Bagaimana upaya kita untuk dapat tetap menggairahkan para kader ini dalam melaksanakan KIE di masyarakat melalui cara-cara persuasif tanpa harus tergantung pada hal-hal yang bersifat finansial.

Sementara itu, dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui catur bina, terbentur oleh terbatasnya jumlah kelompok, cakupan, terbatasnya jumlah kader penekun yang tidak bosan-bosannya memberi KIE pada warga masyarakat akan pentingnya terus mempertahankan dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan harmonis serta tidak mudah tergerus atau terombang-ambing oleh arus globalisasi. Saat ini jumlah kelompok BKB yang ada di Kulonprogo sebanyak 383 kelompok dengan jumlah anggota 9.711 keluarga, cakupan sasaran sekitar 40%, kelompok BKR 99 kelompok, anggota 2.628 keluarga, cakupan sasaran sekitar 9%, kelompok BKL 78 kelompok, anggota 2.561 keluarga, cakupan sasaran sekitar 5% dan kelompok BLK 6 kelompok yang berbasis di 6 dusun dengan cakupan sasaran sekitar 3%. Dengan demikian, KIE terkait upaya peningkatan ketahanan keluarga juga diperlukan dalam rangka memperluas cakupan kesertaan dalam kegiatan catur bina serta

mengaktifkan kembali sebagian anggota kelompok yang selama ini kurang greget untuk mengikuti kegiatan pertemuan penyuluhan.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tantangan KIE terkonsentrasi pada bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha pada keluarga anggota kelompok UPPKS, terutama yang termasuk dalam kategori keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Saat ini jumlah kelompok UPPKS yang ada di Kulonprogo ada 801 kelompok dengan jumlah anggota 18.458 keluarga. dari jumlah tersebut yang berusaha 13.136 keluarga atau 71,17% dari total anggota. Khusus untuk keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota UPPKS ada sebanyak 12.564 keluarga namun yang berusaha baru 8.238 keluarga atau 65,57%. Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan dalam hal KIE untuk menumbuhkan gairah sekaligus keberanian berwirausaha pada anggota UPPKS yang selama ini masih aktif dalam simpan pinjam.

Minimnya anggaran KB yang bersumber dari APBD tentu akan menjadi tantangan sendiri bagi para pengelola KB di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPD dan KB) Kabupaten Kulonprogo termasuk petugas KB yang berada di 12 kecamatan dalam intensifikasi KIE KB di lapangan. Namun kita tidak boleh menyerah, minimnya anggaran harus disikapi dengan semakin mempererat kerjasama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Depag, TP PKK, Polres), merapatkan barisan dengan institusi yang peduli dengan KB (PKBI, KPA, dll), LSOM serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tidak kalah pentingnya bersinergi dengan BKKBN dan Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Adalah suatu keberuntungan, Kabupaten Kulonprogo selama 3 tahun berturut-turut telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan sarana-prasarana yang sangat membantu dalam intensifikasi KIE dan pelayanan KB di lapangan. Di tahun 2007 ada dukungan untuk pengadaan sepeda motor penyuluh KB, tahun 2008 ada dukungan untuk pengadaan Mobil Unit Pelayanan (Muyan) KB Keliling, laptop, Gynbed dan BKB Kit, dan di tahun 2010 ini ada dukungan dana untuk pengadaan Mobil Unit Penerangan (Mupen) KB. Dengan demikian, ada secercah harapan bahwa KIE KB di Kulonprogo akan kembali bergairah dengan dukungan positif dari semua pihak meskipun tantangan dan masalah yang dihadapi akan semakin besar. Terlebih di Kulonprogo saat ini telah terbentuk Kelompok Seni Peduli KB (KSP-KB) melalui SK Bupati Nomor 237 Tahun 2009 dengan Akte Pendirian Group Kesenian Nomor 431/83/AKTE KT/2009 yang telah aktif berkiprah melalui pembuatan lagu campur sari, siaran radio, pertunjukan wayang dan dagelan KB, dan sebagainya.

***Drs. Mardiya, Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo***